

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh  
Ibrahim Fikma Edrisy**

Implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang narkotika, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitas namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Mengapa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung sangat rendah. Apakah hambatan implementasi rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalah guna narkotika. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalah guna narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain struktur hukum yaitu Direktorat Narkoba Polda Lampung mengenai implementasi rehabilitasi masih kurang optimal, kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala anak penyalah guna narkotika adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Lampung seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika.

**Kata Kunci :** Rehabilitasi, Anak, Narkotika.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION ON UNDER AGE NARCOTICS USERS (Studies In The Jurisdiction of Polda Lampung)**

**By  
Ibrahim Fikma Edrisy**

The implementation of rehabilitation on under age narcotics users based on state regulation of narcotics, an addicts narcotics users is obliged to take a rehabilitation process, but this policy has never been applied, most of the under age narcotics users were sentenced to be put in jail than taking rehabilitation. The formulation of problem in this thesis are: why is the implementation of rehabilitation on under age narcotics users so low. What is the problem on implementing rehabilitation on under age narcotics users. What do the police at polda lampung do on under age narcotics users.

This research is using yuridis normative and yuridis empiris approach. The data in this research are primary and secondary data. The primary data is collected from interview and the secondary data is from literature study.

The result of the research show that the implementation of rehabilitation on under age narcotics users is not in line with state regulations, they are government policy, policy of health minister on technical regulation on medical rehabilitation for the drugs addicts, drugs users, and victim of drugs users, which stated that the under age narcotics users is supposed to be put in rehabilitation but this rule has never been applied on, most of the under age narcotics users were put in jail than on rehabilitation. The problem on rehabilitation is affected by some factors like law structure of Direktorat Narkoba Polda Lampung on the implementation of rehabilitation is not optimal, law culture on the level of obedience of the society about the law is not optimal, and the effort of Kepolisian Daerah Lampung in solving the under age narcotics users is through preemptive, preventive, and repressive way.

The suggestion in this research is the Kepolisian Daerah Lampung was supposed to choose rehabilitation on under age narcotics users because there is clear regulation about it like the state regulation on narcotics Number 35 Tahun 2009, and the government is encouraged to maximize the function of the social services related with the rehabilitation on under age narcotics users.

**Keywords :** Rehabilitation, Under Age, Narcotics